

LAPORAN KINERJA (LKJ)

TAHUN 2023



KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Penjelasan Umum Organisasi

1.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Berdasarkan pasal 221 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatakan bahwa daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Sehingga secara umum kecamatan melaksanakan tugas pemerintahan umum yang merangkum seluruh kegiatan pemerintahan. Organisasi dasar adalah struktur dasar yang digunakan untuk membentuk sebuah organisasi. Kantor Camat IV Jurai Terbentuk melalui Proses pembentukan organisasi. Penetapan tujuan atau misi organisasi. Tujuan ini harus jelas dan dapat diukur untuk memberikan arah dan fokus bagi organisasi. Identifikasi Kebutuhan Organisasi perlu mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ingin diatasi. Ini termasuk mengidentifikasi pemangku kepentingan (stakeholder) dan memahami pasar atau lingkungan di mana organisasi akan beroperasi. Perencanaan kebutuhan identifikasi, organisasi perlu membuat rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Ini melibatkan pengembangan strategi, struktur organisasi, sumber daya manusia, dan alokasi sumber daya lainnya. Pendirian Hukum Organisasi harus didirikan secara hukum sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di wilayah atau negara tempat mereka beroperasi. Ini mungkin melibatkan pendaftaran sebagai badan hukum, pengajuan dokumen resmi, dan memenuhi persyaratan lainnya. Rekrutmen dan Pembentukan Tim Organisasi perlu merekrut anggota atau tim yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka. Ini melibatkan proses seleksi, pelatihan, dan pengembangan tim untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan.

Pemeliharaan dan Pengembangan Organisasi perlu terus memelihara operasi mereka dan mengembangkan diri mereka untuk tetap relevan dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan pasar. Perbub No. 15 Tahun 2017 merupakan Peraturan Bersama antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Cara Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Lampiran 4 dari peraturan tersebut kemungkinan adalah salah satu bagian yang mengatur tentang prosedur pembentukan organisasi perangkat daerah (OPD) di tingkat daerah. Pembentukan organisasi merupakan proses yang kompleks dan memerlukan perencanaan yang cermat serta komitmen dari para pemangku kepentingan.

1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Kantor Camat IV Jurai mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain:

- a. Menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan
- b. Melaksanakan pengelolaan urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat
- c. Mensinergikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan
- e. Melakukan pemeliharaan prasarana baik koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal, dengan pihak swasta dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah Kecamatan
- f. Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- g. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
- h. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa
- i. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku.

Tugas pokok Camat dalam melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi aspek :

- a. Perizinan
- b. Pelayanan non perizinan

Aspek pelayanan non perizinan, meliputi :

- a. Rekomendasi
- b. Koordinasi
- c. Pembinaan
- d. Pengawasan
- e. Fasilitasi
- f. Penetapan
- g. Penyelenggaraan
- h. Surat keterangan

Tugas pokok Camat dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

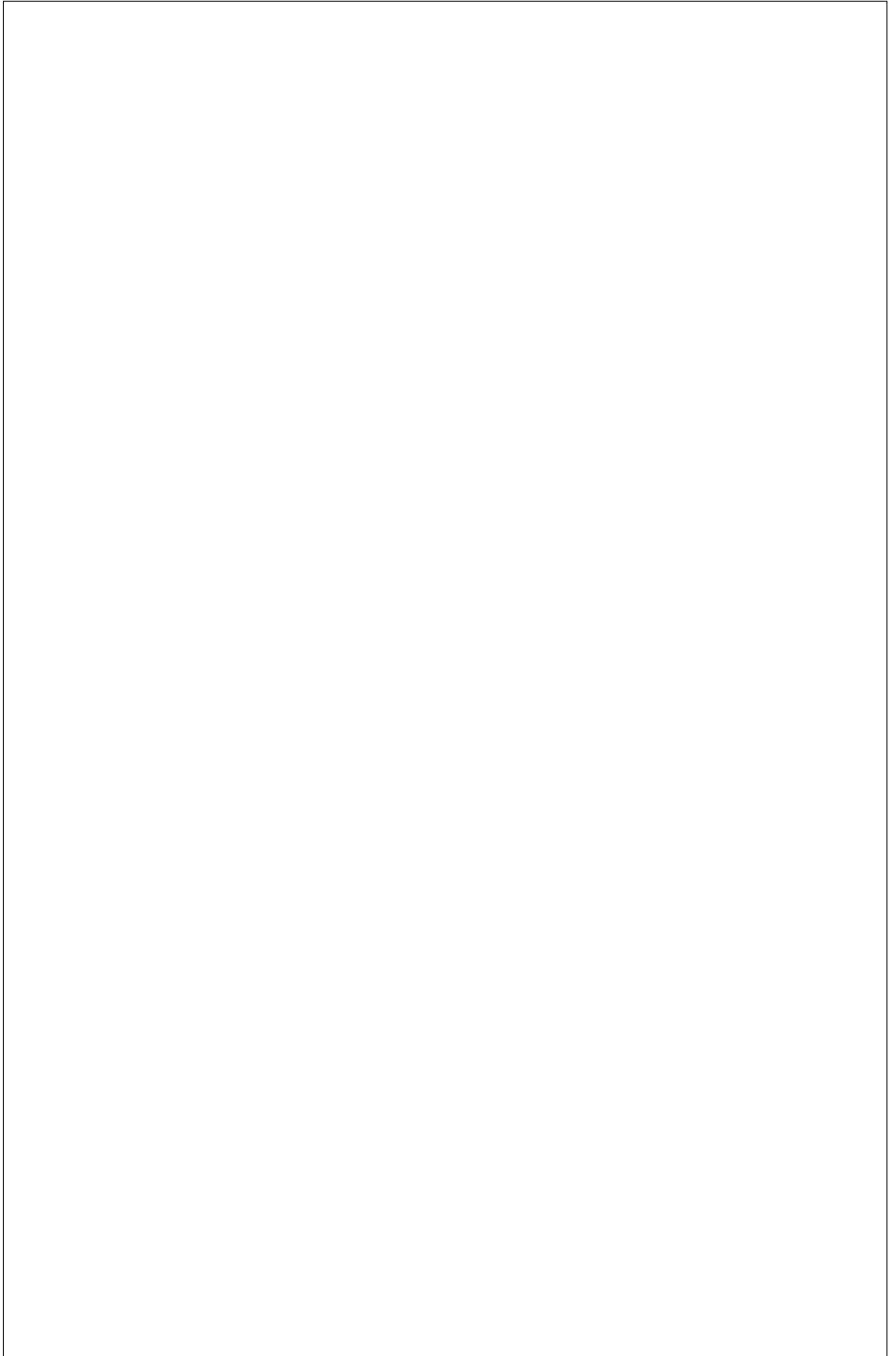
- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- i. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa / Kelurahan

1.1.3 Struktur Organisasi

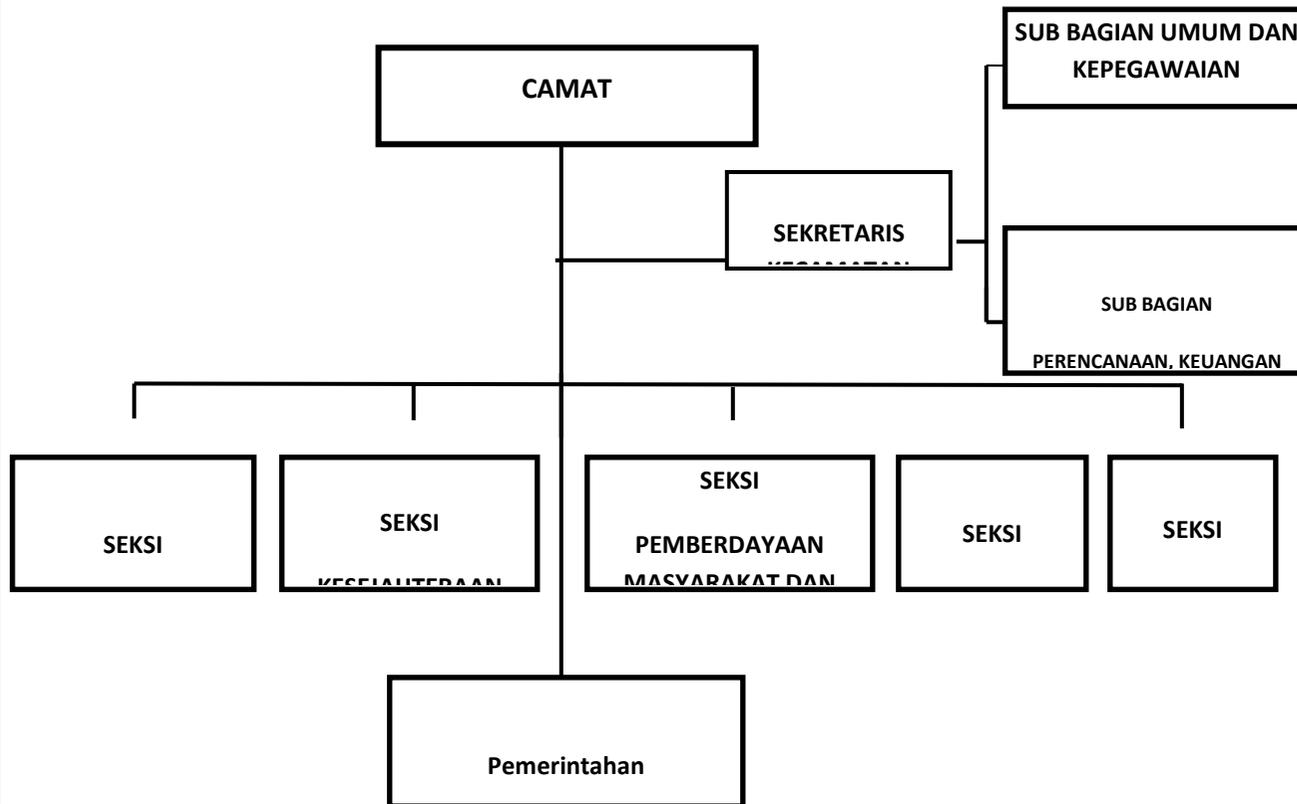
Struktur organisasi Kantor IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor: 11 Tahun 2012, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Camat (Eselon III.a) : Ferro Yuandha Putri, S.STP
- b. Sekretaris Kecamatan (Eselon III.b) : Zul Irfan Harun, S.STP
- c. Kasubbag.Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan (Eselon IV.b) : Dilla Permata Putri, A.Md
- d. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian (Eselon IV.b) : Susmiyar Derita, S.Ap
- e. Kasi. Pemerintahan (Eselon IV.a) : Ryan Hanggara, S.STP
- f. Kasi. Kesejahteraan Sosial (Eselon IV.a) : Zulmadenti, S.Ag
- g. Kasi. Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian (Eselon IV.a) : Lismawati, SE
- h. Kasi. Pelayanan (Eselon IV.a) : Syafrul SY, SH
- i. Kasi. Ketentraman dan Ketertiban (Eselon IV.a) : Duna Gespin, S.Kom
- j. Staf :
 - 1. Martodi, S.Sos
 - 2. Nia Audia, S.Ap
 - 3. Suhardas
 - 4. Irwandi
 - 5. Resfi Livia
 - 6. Irwan Ys
 - 7. Ferinaldi Fauzi
 - 8. Khairul Firdaus
 - 10.Neneng Vitria Marta
 - 11.Vera Raka Siwi
 - 12.Risdawati
 - 13.Dewi Siti R, A.Md
 - 14.Yuda

Struktur Organisasi Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Sebagai berikut :



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**



1.1.4. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya Manusia Kantor Kecamatan IV Jurai keadaan pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebanyak 24 orang, dan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebanyak 24 orang dengan golongan sebagai berikut:

Golongan (Pegawai Negeri/Honor)	Keadaan 1 Januari 2023 (orang)	Keadaan 31 Desember 2023 (orang)
IV	0	0
III	16	16
II	2	2
I	-	-
Honor	5	5
Jumlah	24	24

Latar belakang pendidikan Manusia yaitu :

Pendidikan	Keadaan 1 Januari 2023 (orang)	Keadaan 31 Desember 2023 (orang)
S3	-	-
S2	-	-
S1	11	11
D III	2	2
D II	-	-
D I	-	-
SLTA	10	10
SLTP	-	-
SD	-	-
Jumlah	23	23

1.2 Aspek Strategi Organisasi

1. Visi dan Misi

Untuk mencapai saasaran Pembangunan di Kecamatan IV Jurai pada akhir Tahun 2021 seperti ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 116 Tahun 2021 tentang Rencana Strategi Kecamatan IV Jurai.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih:



**“Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan Yang Mandiri,
Unggul, Agamais dan Sejahtera**

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

- a. Mandiri: berdiri sendiri, yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang di miliki daerah secara optimal.
- b. Unggul: Masyarakat memiliki kemampuan berfikir berkualitas dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul.
- c. Agamais: mengandung makna suatu kondisi masyarakat dapat mempelajari, memahami , melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai agama dan adat.
- d. Sejahtera: perlu sejumlah program yang akselerasi untuk bisa mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) di Pesisir Selatan terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih:

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsive dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehudupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembengaunan berkelanjutan.

5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.

Pernyataan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tersebut di atas memberikan arahan bagi seluruh SKPD didalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan renstra Kecamatan IV Jurai, yaitu :

1. Menumbuh kembangkan kehidupan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang religius dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Mewujudkan Masyarakat yang berpendidikan memiliki daya saing kreatifitas yang tinggi
3. Mewujudkan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.
4. Menciptakan Kawasan yang ramah industri serta bersaing di segala bidang perekonomian.

1.3 Permasalahan Utama Organisasi

Permasalahan utama yang terjadi Issu Strategis yang dihadapi di Kecamatan IV Jurai :

Isu-isu internal

1. sumber daya manusia yang masih belum optimal
2. Minimnya Kompetensi pegawai di Kecamatan IV Jurai sehingga terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugas.
3. Sarana dan Prasarana yang belum lengkap
4. Adanya perubahan/mutasi jabatan mengakibatkan tidak sinkronnya perencanaan dari RPJMD, Renstra, Renja dan PK yang berakibat Pada tidak selarasnya kegiatan.
5. Sistem kerja yang belum optimal
4. Administrasi yang belum tertib

Isu – isu eksternal

5. Kondisi masyarakat yang selalu berubah
6. Perkembangan perubahan lingkungan
7. Peningkatan potensi pengembangan jasa perdagangan
8. Potensi pengembangan pertanian mengarah ke komersial
9. Potensi berkembangnya industri dan pariwisata

10. Belum adanya peran aktif masyarakat, baik dalam pembangunan maupun dalam menciptakan rasa aman.
11. Belum adanya Fasilitas kesehatan yang representative.
12. Belum adanya sarana promosi yang representative.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

2.1.1 Visi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai rencana strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran (*out put*) dan hasil (*out comes*) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2021–2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Renstra Kantor Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

Visi : Melayani dan Mengayomi dalam Mewujudkan Masyarakat Kecamatan IV Jurai yang Mandiri dan Sejahtera

2.1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk misi yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi Kantor Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan sebanyak 3 (tiga) misi sebagai berikut :

- 1 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan dengan Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih**
- 2 : Memperkuat Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Nagari dengan didukung Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang Profesional**
- 3 : Mengefektifkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat**

2.1.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan mensukseskan program Pendidikan
2. Terwujudnya peningkatan pelayanan Pemerintah Kecamatan kepada masyarakat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan IV Jurai

3. Turwujudnya Pembangunan di segala bidang, dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang disertai dengan partisipasi aktif masyarakat.
4. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat, guna menekan angka kemiskinan dan pengangguran.

SASARAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi publik
2. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan
3. Meningkatnya kualitas perencanaan di tingkat Kecamatan
4. Optimalisasi capaian target PBB
5. Meningkatnya tertib administrasi perizinan bangunan
6. Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan Desa

Berdasarkan visi dan misi di atas, telah ditetapkan 3 (tiga) tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis Kantor Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, seperti pada tabel berikut:

Tujuan 1	Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public
Sasaran 1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
Tujuan 2	Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan professional
Sasaran 2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan IV Jurai
Tujuan 3	Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan Nagari
Sasaran 3	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Nagari

Pencapaian tujuan dan sasaran di atas sangatlah tergantung pada prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya disektor Pelayanan.

Tujuan pengembangan dan pembinaan Kecamatan IV Jurai dalam rangka menciptakan program pembangunan dan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang optimal, adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada sehingga dapat berguna sebagaimana yang diharapkan demi kesejahteraan masyarakat.

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan pembangunan Kecamatan baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.
3. Mendorong peran aktif Pemerintahan Nagari untuk mengajak masyarakat supaya lebih giat dalam meningkatkan penghasilan ekonomi masyarakat dan untuk mengurangi angka kemiskinan.
4. Meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia (angkatan kerja) dan fasilitas penunjangnya dalam upaya mengurangi angka pengangguran.
5. Sebagai ujung tombak program pemerintah baik dalam bentuk pelaksanaan pembangunan (fisik, sarana-prasarana) maupun dalam pengentasan angka kemiskinan dan pengangguran.

Sasaran untuk mewujudkan tujuan yang tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk mencapai pelayanan masyarakat yang optimal.
2. Meningkatkan upaya aparatur yang professional dan handal melalui pengembangan SDM (malalui Diklat-diklat).
3. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan.
4. Melaksanakan berbagai musyawarah perencanaan pembangunan baik ditingkat Kampung sampai ke tingkat Kecamatan.
5. Meningkatkan sarana-prasarana petugas dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efesiensi kerja.
6. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Masyarakat dan aspek pengetahuan dan keterampilannya untuk peningkatan kesejahteraan.
7. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja dengan cara melakukan pelatihan keterampilan dengan menjalin kerjasama lintas sektor SKPD dan program Pemerintah Pusat seperti PNPM-MP.

Untuk mencapai sasaran maka ditetapkan strategi yang berisikan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 pada Kantor Camat IV Jurai dapat dilakukan dengan menetapkan rencana strategis Tahun 2023 yang berisikan target kinerja, sasaran dan kegiatan dapat dilihat pada Pengukuran Kinerja SKPD.

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja Kantor Camat IV Jurai, berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, dan Berdasarkan surat perjanjian kinerja tahun 2023 antara Bupati Pesisir Selatan dan Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, telah ditetapkan Perjanjian Kinerja, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja beserta Target Tahun 2023 serta Penetapan Program dan Perubahan Anggaran terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
CAMAT IV JURAI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Terkoordinasinya penyelenggaraan pembangunan di segala Bidang	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dan stockholder dalam pembangunan di Kecamatan IV Jurai
	Inovasi TAROMPA (Tanaman Hidroponik Ampuan Lumpo)	Terpenuhinya Ketahanan Pangan Masyarakat di Nagari
	Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih	Peringkat penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan kantor camat IV Jurai
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah Nagari yang profesional dan akuntabel	Jumlah Nagari yang dibina
3	Terwujudnya pelayanan prima sesuai standar pelayanan yang ditetapkan	Jumlah standar pelayanan yang dilaksanakan dan ditindaklanjuti

No	Program/Kegiatan	Anggaran	
		Sebelum Perubahan	Setelah Peruba
1.	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.842.981.460	1.695.71
2.	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 145.760.714	152.9€
3.	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 90.129.087	85.12
4.	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 31.510.200	43.11
	Jumlah	Rp. 2.110.381.461	1.976.91

1. Tabel Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kecamatan IV Jurai

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
1.	<p>Terkoordinasinya Penyelenggaraan Pembangunan di Segala Bidang</p> <p>Inovasi TAROMPA (Tanaman Hidroponik Ampuan Lumpo)</p> <p>Terwujudnya Pemerintah Yang Baik dan Bersih</p>	<p>Persentase tingkat partisipasi masyarakat dan Stakeholder dalam Pembangunan</p> <p>Terpenuhinya Ketahanan Pangan Masyarakat di Nagari</p> <p>Peningkatan penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kantor camat IV Jurai</p>	<p>60%</p> <p>1 Inovasi</p> <p>BB (71,04)</p>	<p>60%</p> <p>1 Inovasi</p> <p>BB (71,04)</p>
2.	<p>Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah nagari yang Profesional dan Akuntabel</p>	<p>Jumlah Nagari yang dibina</p>	<p>20 Nagari</p>	<p>20 Nagari</p>
3.	<p>Terwujudnya pelayanan prima sesuai standar pelayanan yang ditetapkan</p>	<p>Jumlah standar Pelayanan yang dilaksanakan dan ditindaklanjuti</p>	<p>70%</p>	<p>70%</p>

Tabel 7

1. Tabel Program dan Perubahan Anggaran Terakhir Kecamatan IV Jurai

Program dan Kegiatan		Anggaran	
		Sebelum	Sesudah
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
<i>z</i>	a Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		
	<i>Sub Kegiatan</i>		
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan		
	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	b Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.842.981.460	1.695.713.067
	<i>Sub Kegiatan</i>		
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.800.381.460	1.666.913.067
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42.600.000	28.800.000
I	c Administrasi Umum Perangkat Daerah	145.760.714	152.960.714
	<i>Sub Kegiatan</i>		
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.167.051	9.164.049
	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.926.315	37.742.717
	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.017.348	8.051.148
	4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.800.000
	5 Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.800.000	
	6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.050.000	96.202.800
	d Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	90.129.087	85.129.087
	<i>Sub Kegiatan</i>		
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.060.000	6.060.000
	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	84.069.087	79.069.087
	e Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.510.200	43.110.200
	<i>Sub Kegiatan</i>		
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.010.200	35.610.200
	2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.500.000	7.500.000
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
	a Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
	<i>Sub Kegiatan</i>		
	1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan		
	2 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang di limpahkan		
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
A	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
	<i>Sub Kegiatan</i>		
	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
	2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan		
	PROGRAM KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN		

		Sub Kegiatan		
	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
	a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
		<i>Sub Kegiatan</i>		
	1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
	2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
	a	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
		<i>Sub Kegiatan</i>		
	1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

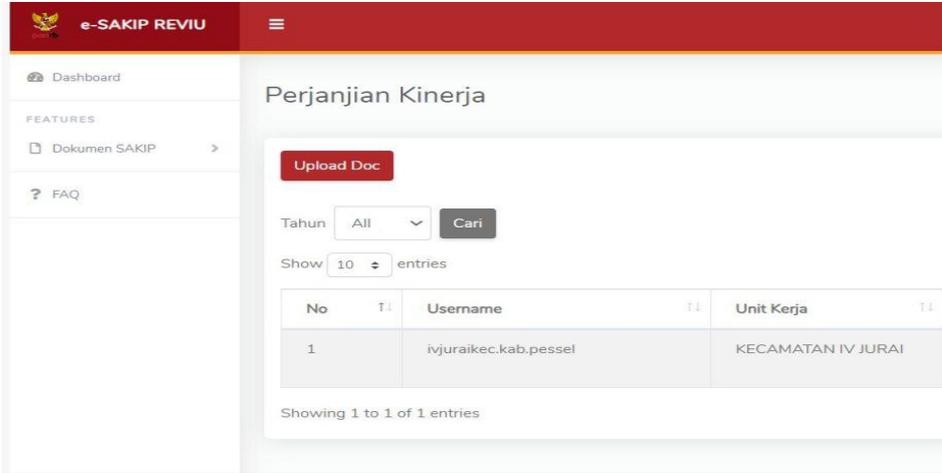
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kecamatan IV Jurai sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan IV Jurai, yaitu sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan Pengukuran	Target Tahun 2022
1.	Terkoordinasikannya penyelenggaraan pembangunan di segala bidang	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam pembangunan di kecamatan IV Jurai	Persen (%)	60%
	Inovasi TAROMPA (Tanaman Hidroponik Ampuan Lumpo)	Terpenuhinya ketahanan pangan Masyarakat di Nagari	1 Inovasi	1 Inovasi
	Terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih	Peningkatan penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kantor Camat IV Jurai	Nilai	BB
2.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan nagari yang professional dan akuntabel	Jumlah Nagari yang dibina	Nagari	20
3.	Terwujudnya pelayanan prima sesuai standar pelayanan yang ditetapkan	Jumlah standar pelayanan yang dilaksanakan dan ditindaklanjuti	Persen %	70

3.1

Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Sakip) di Kecamatan IV Jurai Kab. Pesisir Selatan adalah Aplikasi esr.menpan.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk rencana Operasional Pelaksana Kegiatan (ROPK), Anggaran kas, Monitoring dan evaluasi Capaian Kinerja bulanan, triwulan dan tahunan.



The screenshot displays the 'e-SAKIP REVIU' application interface. The main content area is titled 'Perjanjian Kinerja' (Performance Agreement). It features an 'Upload Doc' button, a search filter for 'Tahun' (Year) set to 'All', and a 'Cari' (Search) button. Below the search filter, there is a 'Show 10 entries' dropdown. The main content area contains a table with the following data:

No	Tahun	Username	Unit Kerja
1		ivjuraikec.kab.pessel	KECAMATAN IV JURAI

Showing 1 to 1 of 1 entries

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan, baik keberhasilan- keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2023.

3.1 METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TERGET KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023. Metode pengukuran kinerja digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1.	85% - 100%	Sangat Baik
2.	69% - 84%	Baik
3.	53% - 68%	Cukup
4.	< 53%	Gagal

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan IV Jurai dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Kecamatan IV Jurai Tahun 2023

NO.	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat						
Tujuan 1 : Terwujudnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pembangunan di segala bidang dan terwujudnya pemerintah yg bersih						
1.	Terkoordinasannya penyelenggaraan pembangunan di segala bidang Inovasi TAROMPA (Tanaman Hidroponik Ampuan Lumpo) Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih	1. Persentase tingkat partisipasi masyarakat dan Stockholder dalam pembangunan di kecamatan iV Jurai terpenuhinya ketahanan pangan Masyarakat di Nagari Peringkat penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan kantor camat IV Jurai	Persen (%) buah	60 % BB	60 % BB	100 100

				Nilai			
Tujuan 2 : Terwujudnya Pemerintahan dan aparatur yang professional , Transparan, Akuntabel							
2.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah Nagari yang professional dan akuntabel	1.	Jumlah Nagari yang dibina	Nilai	BB	BB	100
Tujuan 3 : Terwujudnya Pelayanan Prima							
3.	Terwujudnya pelayanan prima sesuai standar pelayanan yang ditetapkan	1.	Jumlah standar pelayanan yang dilaksanakan dan ditindaklanjuti	Persen (%)	70	70	100

Dari tabel di atas dapat dilihat, capaian rata-rata 3 (Tiga) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 3 (Tiga) sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 100,%, sebanyak 3 (Tiga) indikator nilainya predikat **Sangat Baik**.

3.3 CAPAIAN KINERJA

Adapun tingkat capaian kinerja Kecamatan IV Jurai Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dan disajikan melalui analisis capaian kinerja per sasaran strategis dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Sasaran 1 : Terkoordinasikannya penyelenggaraan pembangunan di segala bidang, Inovasi TAROMPA (Tanaman Hidroponik Ampuan Lumpo) dan terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.3 berikut ini

Tabel 3.3**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dan Stockholder dalam pembangunan di kecamatan IV Jurai	Persen (%)	60 %	60%	100
	Inovasi Tarompa (Tanaman Hidroponik Ampuan Lumpo	Jenis	1 Inovasi	1 Inovasi	100
	Terwujudnya Pemerintahan yang baik dan bersih	Skala	BB	BB	100
Rata-rata Capaian					100

Dari tabel 3.3. di atas dapat dilihat rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 1 sebesar 100%. Pencapaian sasaran strategis 1 termasuk kategori keberhasilan **Sangat Baik**.

1. Nilai Evaluasi LKj

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dilakukan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan laporan capaian kinerja hasil evaluasi atas laporan kinerja (LKj) Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022 adalah 71,04 dengan kategori BB.

Sasaran Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diukur dengan indikator yang diperjanjikan yaitu Nilai Hasil Evaluasi Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, Komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan kinerja. Rincian penilaian capaian kinerja tersebut seperti pada tabel 3.5 di bawah ini :

Tabel 3.4

Hasil Evaluasi LKj Kecamatan IV Jurai Tahun 2022 s.d 2023

No.	Komposisi Yang Dinilai	Nilai		Komposisi Yang Dinilai	Nilai	
		Bobot	2022		Bobot	2023
a.	Perencanaan Kinerja	30	16,87	Perencanaan Kinerja	30	26,89
b.	Pengukuran kinerja	25	23,76	Pengukuran kinerja	30	23,61
c.	Pelaporan kinerja	15	13,36	Pelaporan kinerja	15	10,63
d.	Evaluasi Internal	10	7,00	Evaluasi Akuntabilitas Internal	25	19,79
e.	Capaian kinerja	20	10,05			
	Nilai Hasil Evaluasi	100	71,04	Nilai Hasil Evaluasi	100	80,92
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB		

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat, 2023

Tingkat akuntabilitas kinerja yang diraih oleh Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan laporan hasil evaluasi atas Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 dari Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 700/1.2.1/723/Insp-PS/2024 Tanggal 22 Maret 2024 perihal Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu:

- A. Perencanaan Kinerja (Bobot 30,00%) dengan Nilai Capaian 26,89;
1. Dokumen Perencanaan Kinerja Nilai capaian 6.00 hal yang perlu menjadi perhatian adalah:
Tujuan Renstra telah disertai target keberhasilan, namun perlu disinkronkan dengan indikator sasaran dan tujuan dalam program dan kegiatan.
 2. Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Memenuhi standar yang baik dengan Nilai Capaian 8,55, yang perlu diperhatikan:
Dokumen Renstra belum seluruhnya dilakukan reuiu secara berkala.
 3. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil uang berkesenambungan dengan Nilai sebesar 11,42

B. Pengukuran Kinerja (Bobot 30,00%) dengan Nilai Capaian 23,61;

1. Pemenuhan Pengukuran dengan Nilai Capaian 5,00 dimana telah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja.
2. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan Nilai Capaian 11,20 hal yang perlu menjadi perhatian adalah: Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi telah dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semester).
3. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward and Punishment, penyesuaian stratedis dalam mencapai Kinerja yang efektif dan efisien dengan Nilai Capaian 7,41 hal yang perlu menjadi perhatian adalah : IKU harus dimafaatkan seluruhnya dalam penilaian kinerja.

C. Pelaporan Kinerja (Bobot 15,00%) dengan Nilai Capaian 10,63;

1. Pemenuhan Laporan dengan Nilai Capaian 3,00, yang mana Laporan Kinerja telah disusun, dilaporkan tepat waktu dan telah aploud kedalam website serta telah menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU.
2. Penyajian Informasi Kinerja dengan Nilai Capaian 3,71, hal yang perlu menjadi perhatian adalah : Informasi kinerja dalam laporan Kinerja belum dapat diandalkan.
3. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategis/kebijakan dalam mencapai kinerja dengan Nilai Capaian 3,60, hal yang perlu menjadi perhatian adalah : Informasi yang disajikan belum seluruhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Bobot 25,00%) dengan Nilai Capaian 19,79:

1. Pemenuhan Evaluasi Akuntabilitas Internal dengan Nilai Capaian 5,00 sudah ada kemajuan pencapaian kinerja serta hambatan yang telah ter akomodir secara menyeluruh, dan evaluasi program serta rencana aksi telah tercapai sesuai dengan bobot yang di tentukan.
2. Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai dengan Nilai Capaian 4,88, hal yang perlu menjadi perhatian adalah : Hasil Evaluasi harus dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada.
3. Implemen SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja OPD, sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja dengan Nilai Capaian 8,75, hal yang perlu menjadi perhatian adalah : Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja tindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata dan perbaikan serta peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Laporan Kinerja (LKj) yang dilakukan terhadap Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, Tim evaluasi merekomendasikan kepada Camat IV Jurai beserta seluruh jajarannya agar dapat dilakukan perbaikan untuk dapat mewujudkan kinerja yang lebih baik lagi, sebagai berikut :

- A. Perencanaan Kinerja (Bobot 30,00%) dengan Nilai Capaian 25,97;
1. Perencanaan Strategis agar memuat seluruh tujuan telah dilengkapi dengan target pencapaiannya, sehingga dalam kondisi tertentu target tujuan dapat direpresentasikan oleh target sasaran tahun terakhir dari periode RPJMD/Renstra.
 2. Perencanaan Kinerja Tahunan perlu ditingkatkan sebab dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun dan selaras dengan perjanjian kinerja yang telah disajikan dalam IKU.
- B. Pengukuran Kinerja (Bobot 30,00%) dengan Nilai Capaian 20,97;
1. Pemenuhan Pengukuran perlu dipertahankan dan ditingkatkan.
 2. Kualitas Pengukuran hal yang perlu menjadi perhatian adalah: agar pengumpulan data kinerja atas rencana aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semester).
 3. Implementasi Pengukuran hal yang perlu menjadi perhatian adalah :
 - a. Agar IKU dimanfaatkan untuk penilaian kinerja.
 - b. Agar target kinerja eselon III dan IV dimonitor pencapaiannya.
- C. Pelaporan Kinerja (Bobot 15,00%) dengan Nilai Capaian 11,26;
1. Pemenuhan Laporan yang mana Laporan Kinerja telah disusun, dilaporkan tepat waktu dan telah aploud kedalam website serta telah menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU.
 2. Penyajian Informasi Kinerja hal yang perlu menjadi perhatian adalah : Agar informasi kinerja dalam laporan Kinerja dapat diandalkan.
 3. Pemanfaatan Informasi Kinerja hal yang perlu menjadi perhatian adalah :
 - a. Informasi yang disajikan digunakan dalam perbaikan perencanaan.
 - b. Informasi yang disajikan digunakan untuk penilaian kinerja.
- D. Evaluasi Internal (Bobot 25,00%) dengan Nilai Capaian 18,63:

1. Pemenuhan Evaluasi yang mana telah terdapat pedoman/SOP evaluasi kinerja internal organisasi, pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatan, telah dilakukan evaluasi program dan evaluasi rencana aksi serta hasil evaluasi telah dikomunikasikan dengan pihak yang berkepentingan.
2. Kualitas Evaluasi hal yang perlu mendapat penyempurnaan adalah : Agar hasil evaluasi Rencana Aksi menunjukkan perbaikan setiap periode.
3. Pemanfaatan Evaluasi hal yang perlu mendapat penyempurnaan adalah : Agar hasil evaluasi Rencana Aksi ditindak lanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

Realisasi Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah ini :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
			2021	2022	2023
1.	Nilai Evaluasi LKj Kecamatan IV Jurai	skala	BB	BB	A

Berikut tabel 3.6, realisasi dan capaian indikator kinerja Kualifikasi penilaian Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 adalah:

Tabel 3.6

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai evaluasi LAKIP Kecamatan IV Jurai Tahun 2021-2023

No	Indikator	Satuan	Realisasi			Capaian		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Nilai evaluasi LAKIP Kecamatan IV Jurai	Skala	BB(71,04)	BB(71,04)	A(80,92)	91,58	94,20	100,7

Formulasi capaian indikator kinerja Kualifikasi Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil Evaluasi Inspektorat Pesisir Selatan

Sasaran 2 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Nagari yang Profesional dan Akuntabel

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah Nagari yang di Bina	nagari	20	20	100
<i>Rata-rata Capaian</i>					100

Dari tabel 3.4. di atas dapat dilihat rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 2 sebesar 100%. Pencapaian sasaran strategis 2 termasuk kategori keberhasilan **Sangat Baik**.

1. Jumlah Nagari Yang dibina

Pembinaan dilakukan sesuai kebutuhan, pembinaan 20 nagari di Kecamatan IV Jurai biasanya dibentuk untuk mencapai Pembangunan yang berkelanjutan untuk nagari. Apabila Nagari dibina dengan cermat oleh warganya akan tercipta nagari yang maju.

Sasaran 3 : Terwujudnya Pelayanan prima sesuai standar pelayanan yang ditetapkan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.5 berikut ini :

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah Standar pelayanan yang dilaksanakan dan ditindaklanjuti	persen	70	70	100
Rata-rata Capaian					100

Dari tabel 3.5 di atas dapat dilihat rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 3 sebesar 100%. Pencapaian sasaran strategis 3 termasuk kategori keberhasilan **Sangat Baik**.

1. Pelayanan Prima sesuai standar pelayanan

Pelayanan Prima sesuai standar pelayanan yang ditetapkan akan berdampak pada keefektifan dan keefisienan kerja, sehingga masyarakat cepat dalam mengurus suatu surat perizinan. Bila pelayanan dapat berlangsung dengan prima maka kinerja Staf dapat dinilai baik oleh Camat maupun Masyarakat. Karena Staf telah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Melaksanakan Pelayanan prima dapat dicontohkan seperti Masyarakat ingin Mengurus Surat Keterangan Miskin. Didalam pengurusan Surat Keterangan Miskin.

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan IV Jurai dengan Bupati Pesisir Selatan Tahun 2023, tercantum pada tabel 3.6 dibawah ini :

Tabel 3.6

Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Yang Menunjang Sasaran Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	TAHUN 2021		
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	94.379.770	94.354.630	99,67%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan IV Jurai	1.937.344.226	1.851.584.504	96,66%
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Nagari	14.002.140	14.002.140	100%
Total		2.045.726.136	1.959.941.274	98,68%

Dari tabel diatas dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 untuk menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 sebesar Rp. 2.110.381.461,- terealisasi sebesar Rp. 1.405.669.452,- atau 66,61%. Pada Bulan September sebelum Perubahan Anggaran Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 704.712.009,- atau 33,39% .
- b. Setelah Perubahan Anggaran Menjadi Rp. 1.976.913.068,- terealisasi sebesar Rp. 1.911.765.632,- atau 96,70 %. Jadi Sisa anggaran sebesar Rp. 65.147.436,- atau 3,3 %, mencerminkan akuratnya perencanaan dan penganggaran program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian akuntabilitas kinerja yang dijelaskan pada Bab III, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran

Dari 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan, 3 (tiga) sasaran tersebut mempunyai capaian indikator kinerja mencapai 100%.

2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan, seluruh indikator kinerja berhasil mencapai target.

3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Belanja daerah pada Kecamatan IV Jurai tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 1.911.765.632,- atau 96,70% dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp. 1.976.913.068,-. Dari 3 (tiga) sasaran strategis, capaian anggaran belanja sasaran strategis tertinggi adalah “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Nagari” yaitu 92,48% dan terendah adalah “Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kecamatan IV Jurai” yaitu 84,04%.

Realisasi Program dan Kegiatan Kantor Camat IV Jurai dari 6 (enam) program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini memiliki pagu anggaran Rp.1.976.913.068,- realisasi Rp.1.911.765.632,-,(96,70), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan .

Hasil/keluaran :Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Umum Pemerintahan Daerah.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 0,- realisasi Rp. 0,-(0%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil/keluaran : terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 0,- realisasi Rp. 0,- (0%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluaran : kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan.

4. Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 0,- realisasi Rp. 0,-(0%), Yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil / Keluaran : Terlaksanakan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal dan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 0,- realisasi Rp. 0,- (0%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluaran : terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan Kegiatan Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila serta Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 0,- realisasi Rp.0,- (0%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluaran : terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

4.2 SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Melakukan inovasi-inovasi baru serta penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang mendorong dalam pencapaian target kinerja;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi di internal Kecamatan IV Jurai yang melibatkan seluruh Pejabat Struktural di Kecamatan IV Jurai secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan serta untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah;
3. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Kecamatan IV Jurai dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai agar pegawai dapat lebih cepat merespon kebutuhan yang ada di masyarakat
4. Meningkatkan kerjasama dan peran serta *stakeholders* atau pemangku kepentingan baik dengan pemerintah daerah, instansi pemerintah lainnya, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta elemen masyarakat lainnya dalam melaksanakan program-program pembangunan Kecamatan IV Jurai agar Rencana Pembangunan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kecamatan IV Jurai.

